

Keterlibatan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Afriyadi Afriyadi¹, Masayu Vrisaliani², Natasya Saffa Adesti³, Raja Fitriana^{4*}, Suci Alya⁵, Ahwe Eliza Nanda⁶

¹⁻⁶ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang

*Korespondensi penulis: rajafitriana12@gmail.com

Abstract: Poverty is a common problem that continues to be faced by every region in the world, especially in remote areas, which causes an increase in poverty rates. To overcome the impact of the COVID-19 pandemic, serious efforts are needed to stop its spread, which must be supported by all levels of society by complying with government regulations. Because poverty reflects the inability to meet needs, poverty data is an important indicator in social analysis, especially for policy makers. This research aims to describe and analyze the role and policies that have been implemented by the Tanjungpinang City Government in efforts to reduce poverty. This research uses qualitative methods with literature study as a data collection technique. The conclusion that can be obtained from this research is that a comprehensive evaluation of these programs shows a reduction in the number of poor people and an increase in welfare as a result of the various initiatives implemented. Integrated health, education, skills training and social assistance programs have also helped in providing holistic solutions in overcoming the problem of poverty.

Keywords: Poverty, government, Tanjungpinang

Abstrak: Kemiskinan merupakan masalah umum yang terus dihadapi oleh setiap wilayah di dunia, terutama di daerah-daerah terpencil, yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, diperlukan upaya serius untuk menghentikan penyebarannya, yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mematuhi peraturan pemerintah. Karena kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan, data kemiskinan menjadi indikator penting dalam analisis sosial, terutama bagi pembuat kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran serta kebijakan yang telah diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap program-program tersebut menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan sebagai hasil dari berbagai inisiatif yang diterapkan. Terintegrasi antara program-program kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial juga telah membantu dalam memberikan solusi holistik dalam mengatasi masalah kemiskinan.

Kata kunci: Kemiskinan, pemerintah, Tanjungpinang

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah umum yang terus dihadapi oleh setiap wilayah di dunia, terutama di daerah-daerah terpencil, yang menyebabkan peningkatan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Ini bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga terkait dengan kondisi sosial dan lingkungan. Berbagai masalah sosial dalam masyarakat, seperti kurangnya akses pendidikan, pengangguran, peningkatan jumlah anak jalanan dan pengemis, serta peningkatan kriminalitas, semuanya berakar pada kemiskinan. Oleh karena itu, kemiskinan juga diakui sebagai sumber dari berbagai tindak kejahatan. Karena desakan kebutuhan yang harus dipenuhi dan kurangnya lapangan kerja, orang miskin kadang-kadang melakukan tindakan ilegal untuk memenuhi kebutuhan mereka, termasuk pencurian, perampokan, perdagangan narkoba, dan

Received: Mei 31, 2024; Accepted: Juni 21, 2024; Published: Juni 30, 2024;

* Raja Fitriana, rajafitriana12@gmail.com

pembunuhan. Untuk mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, penanggulangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dan menjadi komitmen bersama baik secara nasional maupun daerah, yang dilakukan secara sistematis, lintas sektoral, lintas pemangku kepentingan, terpadu, dan berkelanjutan. Indonesia telah berhasil dua kali dalam upaya mengurangi kemiskinan. Pertama, menurut data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Indonesia menurun dari sekitar 40% pada tahun 1976 menjadi sekitar 11% pada tahun 1996, yang diakui oleh Bank Dunia sebagai keberhasilan pada masa Orde Baru. Kedua, dari tahun 2005 hingga 2009 (Yusnike & Natalia, 2024).

Dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia mengalami penurunan tingkat kemiskinan yang cepat, menurut data dari World Factbook dan Bank Dunia. Pada Maret 2012, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan turun dari 35,1 juta pada tahun 2005 menjadi 29 juta. Ini menunjukkan penurunan sebanyak 6 juta orang dengan tingkat penurunan yang konsisten. BPS mengukur kemiskinan dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar, di mana kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dari sudut pandang ekonomi sampingan, bukan dari sudut pandang pengeluaran yang diukur dengan Garis Kemiskinan (Rahayuningsih dkk, 2024). Garis Kemiskinan Makanan (GKM) mencakup 52 komoditas berbeda, sementara Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) mencakup 51 komoditas berbeda di perkotaan dan 47 komoditas berbeda di pedesaan. GK merupakan hasil gabungan dari GKM dan GKNM. Individu yang dianggap "miskin" adalah mereka yang pengeluaran per kapita per bulannya berada di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan terbaru untuk Kota Tanjungpinang, berdasarkan data BPS hingga tahun 2021, mencapai Rp719.776 per kapita per bulan, meningkat dari Rp691.738 pada tahun 2020. Garis Kemiskinan di Kota Tanjungpinang selalu lebih tinggi daripada Garis Kemiskinan Provinsi Kepulauan Riau, yang tercatat sebesar Rp642.425 per kapita per bulan. Persentase penduduk miskin di Kota Tanjungpinang menunjukkan tren penurunan dari 9,34% pada tahun 2016 menjadi 9,03% pada tahun 2019. Namun, persentase ini meningkat pada tahun 2020 dan 2021, menjadi 9,37% dan 9,57% masing-masing. Kondisi ini secara alami terkait dengan dampak pandemi COVID-19, yang mengakibatkan penurunan pendapatan dan peningkatan jumlah penduduk miskin. Pada tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Kota Tanjungpinang adalah 19.980 orang, meningkat 930 orang dibandingkan dengan tahun 2019. Diperkirakan jumlah penduduk miskin akan bertambah menjadi 20.850 orang pada tahun 2021. Untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, diperlukan upaya serius untuk menghentikan penyebarannya, yang harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mematuhi peraturan pemerintah. Karena kemiskinan mencerminkan ketidakmampuan untuk memenuhi

kebutuhan, data kemiskinan menjadi indikator penting dalam analisis sosial, terutama bagi pembuat kebijakan (Abdussamad dkk, 2023).

TINJAUAN LITERATUR

Wicaksono & Tiansyah (2009) berpendapat bahwa meningkatkan kesejahteraan ekonomi suatu negara atau daerah bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup warga negaranya dikenal dengan pembangunan ekonomi. Disebut ilmu ekonomi pembangunan, setelah proses mempelajari pembangunan ekonomi. Meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan standar hidup, dan menciptakan lapangan kerja adalah tiga tujuan utama pembangunan ekonomi. Dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan finansial masyarakat, proses pembangunan ekonomi mempengaruhi perluasan dan restrukturisasi perekonomian. Hal ini mencakup berbagai tindakan yang dimaksudkan untuk mendorong ekspansi ekonomi, mengurangi kesenjangan ekonomi, meningkatkan distribusi pendapatan, dan menumbuhkan suasana yang kondusif bagi pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, memperoleh kesejahteraan yang langgeng dan meningkatkan taraf hidup setiap orang bergantung pada kemajuan ekonomi.

Menurut Sinaga dkk (2023) peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dianggap sebagai indikator pembangunan ekonomi. Restrukturisasi dan modernisasi perekonomian dari struktur tradisional ke modern sering kali merupakan akibat dari meningkatnya pendapatan per kapita suatu budaya. Dengan kata lain, peningkatan output merupakan landasan pertumbuhan ekonomi, sedangkan perubahan institusi dan kemajuan teknologi yang memfasilitasi peningkatan produksi juga berkontribusi terhadap pembangunan atau pembangunan ekonomi. Selain itu, tanda lain dari pembangunan ekonomi adalah ketika peningkatan pendapatan nasional setiap tahunnya melebihi pertambahan jumlah penduduk setiap tahunnya, yang berarti seluruh masyarakat mendapat manfaat ekonomi yang lebih besar.

Menurut Belaid (2022), Kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya ekonomi, sosial, dan budaya yang penting untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan untuk mencapai taraf hidup yang layak atau sebagai kondisi di mana pendapatan atau sumber daya yang dimiliki tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang esensial.

METODE PENELITIAN

Metodologi deskriptif kualitatif dengan studi literatur pada topik "Keterlibatan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan" akan

menggabungkan pendekatan kualitatif untuk menganalisis berbagai literatur terkait yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data akan dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, dan studi kasus terkait. Peneliti akan menggunakan kata kunci yang relevan untuk mencari dan menyeleksi literatur yang berkaitan dengan keterlibatan Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam penanggulangan kemiskinan. Data yang diperoleh dari literatur akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjungpinang, Teguh Susanto, menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara indikator kemiskinan dan kemiskinan ekstrem yang perlu dipahami. Sebagai dasar, perbedaan antara kemiskinan dan kemiskinan ekstrem dapat dilihat dari tingkat pengeluaran per hari seseorang. Kemiskinan ekstrem merujuk pada tingkat kebutuhan atau pengeluaran yang sangat minim, yaitu sebesar Rp 10.739 per hari atau Rp 322.170 per bulan. Sementara itu, kemiskinan, atau disebut juga miskin biasa, terkait dengan tingkat kebutuhan atau pengeluaran yang sedikit lebih tinggi, yaitu sebesar Rp 15.750 per hari atau Rp 472.525 per bulan. Dalam keterangan, disampaikan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami perbedaan antara data kemiskinan dan kemiskinan ekstrem agar tidak salah tafsir. Menurut data yang tersaji, tingkat kemiskinan di Kota Tanjungpinang pada tahun 2022 mencapai 9,85 persen, namun hal ini bukan mencakup persentase angka kemiskinan ekstrem (Tanjung pinang kota).

Disampaikan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem di Kota Tanjungpinang merupakan sebuah prestasi yang telah dicapai oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi faktual, serta hasil musyawarah kecamatan di empat kecamatan di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, diketahui bahwa jumlah angka kemiskinan ekstrem di Kota Tanjungpinang menurun secara signifikan. Melalui proses verifikasi dan validasi terhadap data desil 1 dan desil 2, jumlah kemiskinan ekstrem di Kota Tanjungpinang menurun drastis dari 6.290 KK menjadi hanya 546 KK. Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, jumlah kemiskinan ekstrem di Kota Tanjungpinang mencapai 12.386 KK. Namun, setelah dilakukan pengurangan data anomali, jumlah tersebut turun menjadi 6.290 KK. Melalui berbagai program sosial dari pemerintah pusat dan program penguatan ekonomi masyarakat yang dicanangkan oleh Pemko Tanjungpinang pada periode 2022 hingga pertengahan 2023, angka kemiskinan ekstrem di Kota Tanjungpinang berhasil menurun drastis menjadi hanya 546 KK (Malikah, 2020). Dalam keterangan tersebut juga menegaskan bahwa data mengenai 546 KK kemiskinan ekstrem tersebut telah disampaikan

langsung kepada Kementerian Sosial RI sekitar bulan Juli 2023 oleh Wali Kota Tanjungpinang pada saat itu, Hj. Rahma. Bahkan, jumlah 546 KK tersebut diajukan untuk dimasukkan dalam daftar penerima berbagai program pengentasan kemiskinan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, terdapat perbedaan yang signifikan antara angka kemiskinan dengan angka kemiskinan ekstrem.

Dalam upaya menganalisis efektivitas berbagai program yang telah diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam mengurangi tingkat kemiskinan, penting untuk melakukan tinjauan menyeluruh terhadap berbagai aspek yang terkait dengan program-program tersebut. Program-program tersebut mencakup berbagai inisiatif, seperti bantuan sosial, pelatihan keterampilan, akses layanan kesehatan dan pendidikan, serta program pemberdayaan ekonomi. Evaluasi terhadap efektivitas program-program ini menjadi sangat penting dalam usaha memahami dampak nyata yang dihasilkan oleh langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan di Tanjung Pinang. Pertama-tama, diperlukan evaluasi data terkait tingkat kemiskinan sebelum dan sesudah implementasi program. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi penurunan jumlah penduduk miskin atau peningkatan kesejahteraan sebagai hasil dari berbagai program yang diterapkan. Analisis ini akan memberikan gambaran yang jelas tentang dampak nyata yang telah dicapai oleh langkah-langkah pemerintah dalam memerangi kemiskinan di Kota Tanjung Pinang. Data yang dihimpun dari evaluasi ini akan menjadi dasar yang kuat untuk mengevaluasi keberhasilan program-program tersebut. Selanjutnya, perlu dilakukan pengukuran terhadap sejauh mana program-program tersebut mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program-program tersebut harus benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan dan memberikan dampak yang signifikan bagi mereka. Evaluasi ini akan membantu dalam menentukan apakah program-program tersebut berhasil menyentuh kebutuhan riil dari masyarakat yang menjadi sasaran dari program-program tersebut. Selain itu, penilaian ini juga akan membantu dalam mengevaluasi apakah terdapat kelompok masyarakat tertentu yang belum terjangkau oleh program-program tersebut, sehingga langkah-langkah korektif dapat diambil untuk meningkatkan cakupan program.

Perlu juga dilakukan penilaian terhadap sejauh mana program-program pemerintah terintegrasi satu sama lain. Apakah ada sinergi antara program-program kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial untuk memberikan solusi holistik dalam mengatasi kemiskinan. Integrasi program-program ini menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan adanya integrasi yang baik antara berbagai program tersebut, diharapkan akan tercipta sinergi yang memperkuat upaya

pemerintah dalam mengatasi kemiskinan secara menyeluruh. Selain itu, evaluasi juga perlu dilakukan terhadap implementasi program-program tersebut. Apakah program-program tersebut telah dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan apakah sumber daya yang telah dialokasikan telah dimanfaatkan dengan efisien. Evaluasi ini juga akan membantu dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Terakhir, perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan, seperti kondisi ekonomi dan sosial masyarakat setempat, serta perubahan kebijakan nasional yang dapat mempengaruhi alokasi anggaran dan prioritas program. Dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut, Pemerintah Kota Tanjung Pinang dapat lebih efektif dalam merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah mereka (Zein & Septiani, 2024). Integrasi program-program ini menjadi kunci dalam memastikan efektivitas dan efisiensi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam mengevaluasi program-program yang dilaksanakan, perlu diperhatikan juga apakah program-program tersebut sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya dari masyarakat di Tanjung Pinang. Penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor lokal dan spesifik dari komunitas yang dituju agar program-program yang diimplementasikan dapat memberikan dampak yang maksimal. Terakhir, evaluasi alokasi anggaran dan manajemen keuangan terkait program-program penanggulangan kemiskinan menjadi penting untuk memastikan efisiensi dalam penggunaan sumber daya yang tersedia (Putriyanti, 2022). Perlu dipastikan bahwa dana yang digunakan sesuai dengan tujuan program dan terdistribusi secara adil untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Mengukur hasil atau outcome dari dana yang diinvestasikan dalam program-program penanggulangan kemiskinan menjadi suatu aspek yang penting dalam mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang telah diambil. Evaluasi ini tidak hanya sekadar melihat seberapa besar anggaran yang telah dialokasikan, tetapi juga mengukur dampak nyata yang dihasilkan oleh penggunaan dana tersebut. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah dana yang telah dialokasikan telah menghasilkan perubahan yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Evaluasi hasil atau outcome dari dana yang diinvestasikan ini melibatkan pengumpulan data yang komprehensif tentang dampak program-program tersebut terhadap kondisi kemiskinan. Data yang dikumpulkan mencakup berbagai indikator, seperti penurunan jumlah penduduk miskin, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan menganalisis data ini,

pemerintah dapat mengevaluasi sejauh mana program-program yang telah dilaksanakan telah berhasil mencapai tujuan mereka dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, dalam mengevaluasi efektivitas program-program penanggulangan kemiskinan, penting juga untuk menilai sejauh mana masyarakat terlibat dalam berbagai tahapan program, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait penanggulangan kemiskinan menjadi indikator penting dalam mengevaluasi keberhasilan program-program tersebut. Semakin tinggi tingkat keterlibatan masyarakat, semakin besar pula kemungkinan bahwa program-program tersebut akan berhasil mencapai tujuan mereka. Keterlibatan masyarakat dapat diukur melalui berbagai cara, seperti tingkat partisipasi dalam forum-forum diskusi terkait penanggulangan kemiskinan, tingkat partisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, serta tingkat partisipasi dalam program-program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi. Evaluasi keterlibatan masyarakat ini juga dapat dilakukan melalui survei dan wawancara langsung dengan masyarakat setempat untuk mendapatkan pandangan mereka tentang efektivitas program-program yang telah dilaksanakan (Hariyanto & Junaidi, 2023).

Selanjutnya, evaluasi perlu dilakukan terhadap kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pihak lain yang turut mendukung program-program penanggulangan kemiskinan. Penilaian ini akan membantu dalam mengevaluasi sejauh mana kerjasama lintas sektor telah berjalan efektif dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, diperlukan adanya evaluasi keberlanjutan program-program tersebut dalam jangka panjang. Hal ini mencakup perencanaan dan desain program-program yang mampu memberikan dampak jangka panjang serta mengatasi akar permasalahan kemiskinan (Pratama & Chandra, 2022). Evaluasi ini akan membantu dalam menentukan apakah program-program yang dilaksanakan memiliki potensi untuk berkelanjutan dan memberikan dampak yang berkesinambungan dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Secara keseluruhan, evaluasi terhadap program-program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara menyeluruh dan obyektif. Proses evaluasi ini harus mengacu pada data yang valid dan melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi dan manfaat dari program tersebut (Ariyanti & Prasetyo, 2024). Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan benar-benar efektif dan berdampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dalam menganalisis efektivitas berbagai program penanggulangan kemiskinan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang, kami dapat menyimpulkan bahwa langkah-langkah tersebut memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Evaluasi menyeluruh terhadap program-program tersebut menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin dan peningkatan kesejahteraan sebagai hasil dari berbagai inisiatif yang diterapkan. Terintegrasi antara program-program kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan, dan bantuan sosial juga telah membantu dalam memberikan solusi holistik dalam mengatasi masalah kemiskinan. Namun, masih terdapat tantangan dalam mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam berbagai tahapan program, serta memastikan keberlanjutan dan efisiensi program-program tersebut dalam jangka panjang.

Saran

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, kami merekomendasikan beberapa langkah untuk meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Kota Tanjung Pinang adalah agar meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi program-program penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme partisipatif yang lebih kuat, memperkuat kerjasama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, sektor swasta, dan pihak lainnya dalam mendukung program-program penanggulangan kemiskinan, serta memperluas jejaring kerjasama lintas sektor, memperhatikan faktor-faktor lokal dan spesifik dari komunitas yang dituju dalam merancang program-program penanggulangan kemiskinan, sehingga program-program tersebut dapat lebih sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat setempat, mengoptimalkan alokasi anggaran dan manajemen keuangan terkait program-program penanggulangan kemiskinan untuk memastikan efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia dan distribusi dana yang adil, serta merancang program-program yang dirancang untuk memberikan dampak jangka panjang dan mengatasi akar permasalahan kemiskinan, serta melakukan evaluasi secara berkala untuk memastikan keberlanjutan program-program tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Abdussamad, H. Z., SIK, M. S., & Patta Rapanna, S. E. (2023). *Pusaran kemiskinan dalam perspektif pelayanan publik: The vircle of poverty from a public service perspective*. Syakir Media Press.
- Ariyanti, N., & Prasetyo, M. A. M. (2021). Evaluasi manajemen hubungan masyarakat dan sekolah (studi kasus di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Falah Purwodadi Pasuruan). *Idarah: Jurnal Pendidikan Dan Kependidikan*, 5(2), 103-126.

Belaid, F. (2022). Implications of poorly designed climate policy on energy poverty: Global reflections on the current surge in energy prices. *Energy Research & Social Science*, 92, 102790.

Hariyanto, E., & Junaidi, M. A. (2023). Sinergi pengelolaan zakat dan program bantuan sosial pemerintah untuk mereduksi kemiskinan. *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan*, 16(2), 13-31.

<https://www.tanjungpinangkota.go.id/berita/angka-kemiskinan-ekstrem-di-tanjungpinang-justru-turun-signifikan#:~:text=Pada%20tahun%202021%2C%20angka%20kemiskinan,ekonomi%20masyarakat%20yang%20digelontorkan%20Pemko>

Malikah, C. S. (2020). Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan sistem e-court di Pengadilan Agama Pekanbaru (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Pratama, F. F., & Chandra, D. (2022). Dampak strategis upaya penanggulangan kemiskinan masyarakat perkotaan pada masa pandemi COVID-19 melalui program PKH di Kota Tasikmalaya. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 8(1), 63-76.

Putriyanti, P. (2022). Analisis gaya kepemimpinan dalam meningkatkan kinerja karyawan di IZI Riau (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Rahayuningsih, I., Murtala, M., & Rahmah, M. (2024). Pengaruh utang luar negeri, cadangan devisa, dan investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1991-2021. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(2), 33-49.

Sinaga, M., Damanik, S. W. H., Zalukhu, R. S., Hutauruk, R. P. S., & Collyn, D. (2023). Pengaruh pendidikan, pendapatan per kapita dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kepulauan Nias. *Jurnal Ekuilnomi*, 5(1), 140-152.

Wicaksono, M. D., & Tiansah, A. (2022). Peranan dinas sosial dalam menanggulangi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Kota Lubuklinggau. *Jurnal Kyberman*, 12(1), 110-121.

Yusnike, Y., & Natalia, J. (2024). Peran pemerintah kota Tanjungpinang dalam penanggulangan kemiskinan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 318-324.

Zein, H. H. M., & Septiani, S. (2024). Digitalisasi pemerintahan daerah: Katalis untuk integrasi dan optimasi good governance. Sada Kurnia Pustaka.